

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH

1. Perangkat Daerah (PD) Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, Manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi. Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam system formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Belanja
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 5) Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
- 6) Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA
- 7) Pengendalian dan Pengawasan Pengelola Keuangan Daerah
- 8) Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah
- 9) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- 10) Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- 11) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah
- 12) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah
- 13) Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)
- 14) Penyusunan Dokumen KUA PPAS
- 15) Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- 16) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah
- 17) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten / Kota dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
- 18) Evaluasi Raancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 19) Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
- 20) Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 21) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten / Kota

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

- 1) Jumlah Pegawai Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	PEGAWAI	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	PNS	272	176	96
2	CPNS	1	1	-
JUMLAH		273	177	96

SUMBER : BAPENDA (Desember 2019)

- 2) Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang, Eselonering dan Tingkat Pendidikan
- a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Ruang

NO	PEGAWAI	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
				L	P
1	PNS	GOL. IV	27	21	6
		GOL. III	193	115	78
		GOL. II	52	38	14
		GOL. I	1	1	-
2	CPNS		-	-	-
JUMLAH			273	175	98

SUMBER : BAPENDA (Desember 2019)

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselonering

NO	ESELONERING	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	PEJABAT ESELON II	1	1	-
2	PEJABAT ESELON III	28	22	6
3	PEJABAT ESELON IV	78	64	14
4	PEJABAT FUNGSIONAL	164	90	74
5	JABATAN LOWONG ES III DAN ES IV	2	2	
JUMLAH		273	179	94

SUMBER : BAPENDA (Desember 2019)

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	DOKTOR (S-3)	1	1	-
2	MAGISTER (S-2)	19	12	7
3	SARJANA (S-1)/D IV	145	96	49
4	DIPLOMA III (D-III)	19	6	13
5	SLTA/SMK	85	59	26
6	SLTP	3	3	-
7	SD	1	1	-
JUMLAH		273	178	95

SUMBER : BAPENDA (Desember 2019)

3) Data Pegawai Negeri Sipil untuk Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Orang)	JUMLAH TENAGA KONTRAK (Orang)
1	BPAD	84	50
2	UPTD BPAD Wilayah Kota Kupang	14	27
3	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Kupang	10	25
4	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten TTS	8	13
5	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten TTU	12	10
6	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Belu	11	12
7	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Alor	7	5
8	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Flores Timur	12	20
9	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Lembata	5	12
10	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Sikka	16	5
11	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Ende	11	14
12	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Ngada	9	7
13	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Nagekeo	5	13
14	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Manggarai	9	10
15	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	6	9
16	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	4	8
17	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Sumba Timur	9	8
18	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Sumba Tengah	6	6
19	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Sumba Barat	7	8
20	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	7	12
21	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Rote Ndao	9	9
22	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Sabu Raijua	7	5
23	UPTD BPAD Wilayah Kabupaten Malaka	5	8
JUMLAH		273	296

SUMBER : BAPENDA (Desember 2019)

4. Alokasi, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 100.623.710.250 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 48.187.574.000,- Realisasi Rp. 43.187.958.551 dan belanja langsung sebesar Rp. 52.436.136.250,- Realisasi Rp. 46.514.649.339 dengan realisasi akhir bulan Desember 2019 sebesar Rp. 89.702.607.890 (90,15%) dan sisa anggaran sebesar Rp 10.921.102.360 (10,85%). Pelaksanaan penggunaan anggaran untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

a. **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.079.917.680,- realisasi Rp. 24.138.085.309,- (92,55%) dan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.587.972.000,- realisasi Rp. 20.306.105.028,- (98.63%) dan capaian program: terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, terlaksananya koordinasi pemungutan PKB dan BBN-KB, terlaksananya Rakor Samsat dan Rakor Pajak PPh 21 dan PBB, terlaksananya kegiatan Koordinasi dan penerimaan retribusi lain-lain PD yang sah, Pajak Rokok dan PPh 21 serta pendataan obyek dan subyek PKB di 22 Kabupaten/Kota;
Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sebesar 1,3 Trilyun dari Target di RPJMD sebesar 1,2 Trilyun.
- 2) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.260.470.680,- realisasi Rp. 3.600.702.871,- (68,45%) dan capaian program: terdapat dan tertatanya administrasi barang daerah secara tertib melalui analisa kebutuhan dan pengadaan aset, penatausahaan aset, penetapan dan penilaian aset, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, pengamanan dan pengendalian aset, penyelesaian sengketa aset dan asuransi aset;
Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya Persentase Aset-aset Pemda yang direkonsiliasi dan di-rasionalisasi serta Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah sebesar 75 persen dari target pada RPJMD sebesar 50%.

- 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 231.475.000,- realisasi Rp. 231.277.410,- (99,91%) dan capaian program: peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan Monev Terpadu PAD dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota, Rakor dan Evaluasi Pendapatan dan Aset serta Rakor dan Evaluasi Triwulan. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya Laporan Triwulan dan Monev Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan Urusan Wajib di atas didukung pula oleh program PD (non urusan) yaitu:

- b. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan anggaran sebesar Rp. 10.194.166.240,- realisasi Rp. 9.406.329.648,- (92,271%);
- c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan anggaran sebesar Rp. 16.007.121.250,- realisasi Rp. 12.818.140.301,- (80,077%);
- d. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dengan anggaran sebesar Rp. 154.931.080,- realisasi Rp 152.094.081,- (98,168%).

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada sebanyak 1 (Satu) program dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana digambarkan dalam Lampiran I.2 dan dijelaskan pada point sebelumnya mengenai Alokasi, Capaian Kinerja dan Alokasi Anggaran. Nama Program Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan : Cukup Memadai

7. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada

8. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan : Tidak Ada

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) : Lampiran 1.1 dan Lampiran I.2

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Program-program nasional yang tertuang dalam RKP 2019 kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan program-program yang menjadi prioritas. Penjabaran pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT

NO.	SASARAN	INDIKATOR TARGET	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah;	1,090 T	1,2 Trilyun	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Meningkatnya upaya penatausahaan dan pemanfaatan pengamanan aset secara akuntabel;	50%	100%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset secara professional dan kompetensi aparatur	50%	75%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang/Jasa
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 5) Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
- 6) Penelitian, Penetapan dan Penerbitan DPA dan DPPA
- 7) Pengendalian dan Pengawasan Pengelola Keuangan Daerah
- 8) Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Kas Daerah
- 9) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- 10) Penyusunan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah
- 12) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah
- 13) Penyusunan Analisis Standar Biaya (ASB)
- 14) Penyusunan Dokumen KUA PPAS
- 15) Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- 16) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah
- 17) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten / Kota dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
- 18) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 19) Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
- 20) Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
- 21) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten / Kota.

BAB V TUGAS PEMBANTUAN : Tidak Ada

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN : Tidak Ada

BAB VII SPM : Tidak Ada

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit Perangkat Teknis (UPT) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi focus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut disebabkan karena public atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan demikian

manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

a. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
1.	Meningkatnya Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah	Jumlah PAD	1,2 Trilyun	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	100 %	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	75 %	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja;

No.	Indikator	Kinerja Tahun 2019		Ket.
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah PAD	1,2 Trilyun	1,29 T	
2.	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	100 %	100%	
3.	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	75 %	75%	

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan Target sesuai Perjanjian Kinerja maka realisasi mencapai 107 % tetapi kalau diukur dengan Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 sebesar 1,345 Trilyun maka realisasinya mencapai 95,86 %. Sedangkan Persentase realisasi Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi mencapai 100% dan Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah juga mencapai 100%. Dan rata-rata tingkat capaian kinerja telah menunjukkan angka 98%. Oleh karena itu, berdasarkan target kinerja yang ditetapkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah mencapai tingkat Sangat Berhasil.

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

No.	Indikator	Kinerja		Ket.
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	
1.	Jumlah PAD	1,095 T	1,29 T	
2.	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	50%	100%	
3.	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	50%	75%	

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan Realisasi maka terjadi kenaikan sebesar 200 Miliar Rupiah atau 1,18%. Sedangkan Persentase realisasi Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi mengalami kenaikan sebesar 50% dan Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah juga mengalami kenaikan sebesar 25%.

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;

No.	Indikator	Kinerja		Ket.
		Realisasi 2019	Target RPJMD	
1.	Jumlah PAD	1,29 T	1,200	
2.	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	100%	100%	
3.	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	75%	55%	

Data diatas menunjukkan bahwa berdasarkan Target sesuai RPJMD maka realisasi mencapai 107 %. Persentase realisasi Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi mencapai 100% dan Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah mencapai 130%. .

e. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;

No.	Jumlah	Jumlah		Kinerja	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi
1.	271 Orang ASN	Belanja Tidak Langsung 48.187.574.000,-	43.187.958.551	1,2 Trilyun	1,29 T
2.	321 Orang Pegawai Honorer/Tidak Tetap	Belanja Langsung 52.436.136.250,-	46.514.649.339	100 %	100%
	Total	100.623.710.250,-		75 %	75%

Data diatas menunjukkan bahwa walaupun dengan Sumber Daya Manusia yang terbatas (ASN dan Honorer tersebar di Kantor Badan dan 22 UPT Pendapatan Daerah Se NTT) tetapi beberapa target tetap terpenuhi khususnya di Bidang Pendapatan yang mencapai 100,7% berdasarkan Target RPJMD dan 95,8% berdasarkan Target Perubahan.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Program/Kegiatan		Dana (Rp.)	Tujuan
1.	Jumlah PAD	1,2 Trilyun	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	76.773.000,-	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	3.574.741.500,-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	635.000.000,-	
				Penyediaan Jasa Adminstrasi keuangan	488.950.000,-	
				Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	181.261.300,-	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	1.064.466.000,-	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.172.251.800,-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	45.500.000,-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.900.000,-	
				Penyediaan Makanan dan Minuman	485.976.320,-	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	194.600.000,-	
				Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	220.400.000,-	

				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	130.000.000,-	
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	1.584.500.000,-	
				Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	238.846.320,-	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000,-	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	2.597.174.250,-	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.063.150.000,-	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	305.988.000,-	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	404.492.000,-	
				Pengadaan Meubelair	166.050.000,-	
				Pengadaan Sistem Jaringan	1.578.775.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	193.500.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.141.242.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	128.500.000,-	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan	257.950.000,-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.170.300.000,-	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	154.931.080,-	
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset/Barang Daerah	5.260.470.680,-	

				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah	231.475.000,-	
				Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	20.587.972.000,-	
2.	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	100	Sda	Sda	Sda	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel
3.	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	75	Sda	Sda	Sda	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel

Data diatas menunjukkan Tahun 2019 Badan Pendapatan dan Aset daerah didukung dengan Dana sebesar Rp. 100.623.710.250,- dengan 4 Program dan 31 Kegiatan. Dengan Realisasi Target PAD sebesar 107% terhadap Target pada RPJMD dan 95,8% berdasarkan Target Perubahan serta Persentase realisasi Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi mencapai 100% dan Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah mencapai 130%. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP
LPPD TAHUN 2019

TABEL PEGAWAI

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA PERANGKAT DAERAH : BAPENDA

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Pendapatan dan Aset Daerah

No	Aspek	Fokus	No	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (Diluar program Non Teknis)	1	Jumlah Program yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan urusan (Diluar Program Non Teknis)	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Anggaran Rp. 26.079.917.680 Realisasi Rp. 24.138.085.309	1 Program yang terdapat 3 kegiatan	Lihat di APBD Lampiran 1.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada SOP (Data Terlampir)	Ada 6 (Enam) SOP terkait urusan wajib	Bidang Aset 1 ada 1 SOP Wajib, Bidang Aset 2 ada 1 SOP Wajib, Bidang Pendapatan 2 ada 1 SOP Wajib, Bidang Pendapatan 1 ada 1 SOP Wajib, Bidang Sekretariat ada 1 SOP Wajib, UPTD Kota Kupang ada 1 SOP Wajib
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	1. PERDA Provinsi NTT tentang Retribusi Daerah No. 5 tahun 2018 2. PERDA Provinsi NTT No. 2 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	Ada	

3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 105 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 108	97%	Ada 2 (Dua) orang Kepala UPTD yang pensiun : Kepala UPTD Nagekeo, Sikka, Eselon IV yang lowong: Kasi Ferifikasi UPTD Alor
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan fungsional: Analisis Kepegawaian Penyelia	Ada	1 Orang
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS, sebanyak 273 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 14.832 personil	1,80%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 68 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 108 org	63%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 105 org - Jabatan yang ada, sebanyak 108 pjbt.	97%	

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 5 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA 5. DPPA	5 (lima) jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 (satu) program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 (satu)	100%	
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 (empat) program. - Jumlah Program dalam RKA PD, sebanyak 4 (empat) program.	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 (empat) program. - Jumlah Program dalam DPA PD, sebanyak 4 (empat) program.	100%	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.100.623.710.250 - Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 5.769.807.564.376	1,7%	

		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah Terhadap Total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi Total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.89.702.607.890 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran belanja langsung dan tidak langsung	15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	total belanja langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 46.514.6496.339 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 89.702.607.890	52%	
			16	Total Belanja tidak langsung dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja tidak langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi belanja tidak langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.43.187.958.551 - Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 89.702.607.890	48%	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, LOS, LAK)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 (tiga) jenis sbb: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Operasional 3. Laporan Arus Kas	Ada sebanyak 3 (tiga) jenis :	Laporan Keuangan ini masih dalam Pemeriksaan BPK
4.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang atau Aset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau Aset Perangkat Daerah	Buku Inventaris Barang	Ada	

		Penggunaan Aset Perangkat Daerah	19	Jumlah Aset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Aset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total Aset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Aset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0,- - Aset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.609.557.601.368	0%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Massa Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Mobil Pelayanan SIM keliling 3. Spanduk/Baliho	Jumlah sebanyak 3 (Tiga) jenis	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada		

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

DR. ZET SONY LIBING, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19680713 198903 1 009

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NAMA SKPD

: BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Eselon II (Kepala Pelaksana)	V										1				1			1		
Sekretariat																				
Eselon III-A (Sekretaris)	V									1					1			1	1	
Eselon (Kasubbag Kepegawaian dan Umum)	V									1				1						
Eselon IV-A (Kasubbag PDE)	V								1											1
Eselon IV-A (Kasubbag Keuangan)	V								1					1						1
Bidang Pendapatan I																				
Eselon III-A (Kepala Bidang Pendapatan I,Pajak)	V									1					1			1		
Eselon IV-A (Kasubid Pendataan & Penetapan)	V									1				1						1
Eselon IV-A (Kasubid Layanan dan Keberatan)	V								1					1						1
Eselon IV (Kasubid Pembukuan dan Penagihan)	V								1					1						1
Bidang Pendapatan II																				
Eselon III-A (Kepala Bidang PendapatanII,Pajak)	V									1					1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubid Pendataan & Penerimaan I)	V									1				1						
Eselon IV-A (Kasubid Pendataan dan Penerimaan II)	V								1					1						1
Eselon IV-A (Kasubid Pendataan dan Penerimaan III)	V								1					1						

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset																				
Eselon III-A (Kepala Bidang Aset I)	V								1						1			1		
Eselon IV-A (Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasubid Penatausahaan Aset)	V									1					1					1
Eselon IV-A (Kasubid Penetapan Status dan Penilaian Aset)	V									1					1					1
Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset																				
Eselon III-A (Kepala Bidang Aset II)	V									1					1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubid Pemanfaatan Aset)	V									1				1						
Eselon IV-A (Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset)	V							1						1						
Eselon IV-A (Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset)	V							1						1						1
Analisis Kepegawaian Penyelia									1					1						
Fungsional Umum			1	1	19			7	31	4			5	55	3			1	1	
Total			1	1	19			9	40	14	1		5	68	11			7	13	

KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
UPTD Kota Kupang																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kota Kupang)	V								1					1				1		
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kota Kupang)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kota Kupang)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kota Kupang)	V							1						1						
Fungsional Umum	V			4					5	1			2	8						
UPTD Kabupaten Kupang																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab. Kupang)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Kupang)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab. Kupang)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Kupang)	V								1					1						
Fungsional Umum	V			6				1	8				4	10	1			2	2	
UPTD Kabupaten Rote Ndao																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab. Rote)	V								1					1				1		
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Rote)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab. Rote)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Rote)	V								1					1				1		
Fungsional Umum	V			3					2				3	2						

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
UPTD Kabupaten TTS																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.TTS)	V								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. TTS)	V								1						1				1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.TTS)	V								1						1				1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. TTS)	V								1						1				1	
Fungsional Umum	V			1	1				2			1	1	2						
UPTD Kabupaten TTU																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.TTU)	V								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. TTU)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.TTU)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. TTU)	V								1						1				1	
Fungsional Umum	V				5			2	1				5	3						
UPTD Kabupaten Belu																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Belu)	V								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Belu)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Belu)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Belu)	V								1						1				1	
Fungsional Umum	V				4				2	1			2	5					1	
UPTD Kabupaten Alor																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Alor)	V								1						1				1	

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Alor)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Alor)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Alor)		V																		
Fungsional Umum	V				5								4	1						1
UPTD Kabupaten Flores Timur																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Flortim)	V								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Flotim)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Flortim)	V								1					1					1	
(Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Flotim)	V								1					1						
Fungsional Umum	V				7				1				3	5						
UPTD Kabupaten Lembata																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Lembata)	V								1						1				1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Lembata)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Lembata)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Lembata)	V								1					1						
Fungsional Umum	V				1			1					1	1	1					
UPTD Kabupaten Sikka																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Sikka)	V									1					1			1		
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Sikka)	V								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Sikka)	V				1									1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Sikka)	V								1					1					1	

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Fungsional Umum	V				5			1	6				4	8						
UPTD Kabupaten Ende																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Ende)	V								1						1					1
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Ende)	V								1					1						
(Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Ende)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Ende)	V								1					1						1
Fungsional Umum	V				4			2	1				3	4						
UPTD Kabupaten Ngada																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Ngada)	V								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Ngada)	V								1					1						1
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Ngada)	V								1					1						1
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Ngada)	V								1					1						1
Fungsional Umum	V				3			1	1				2	2	1					
UPTD Kabupaten Nagekeo																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Nagekeo)	V								1						1					1
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Nagekeo)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Nagekeo)	V								1					1						
Eselon IV (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Nagekeo)	V				1									1						1
Fungsional Umum	V				1				1				1	1						
UPTD Kabupaten Manggarai																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Manggarai)	V								1					1						1
NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET

	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Manggarai)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Manggarai)	V								1					1					1	
Eselon IV (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Manggarai)	V				1									1					1	
Fungsional Umum	V				3		1		1				2	3						
UPTD Kabupaten Manggarai Timur																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Manggarai Timur)	V								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Manggarai Timur)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Manggarai Timur)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Manggarai Timur)	V				1									1						
Fungsional Umum	V				2								2							
UPTD Kabupaten Manggarai Barat																				
Eselon IV-A (Kepala UPTD Kab.Manggarai Barat)		V													1					
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Manggarai Barat)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Manggarai Barat)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Manggarai Barat)	V								1					1					1	
Fungsional Umum	V				1								1							
UPTD Kabupaten Sumba Timur																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Sumba Timur)	V								1						1				1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Sumba Timur)	V								1					1						
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Sumba Timur)	V								1					1						
NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/ PANGKAT		PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET		

	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Sumba Timur)	√								1					1					1	
Fungsional Umum	√				4			1					4	1						
UPTD Kabupaten Sumba Tengah																				
Eselon III (Kepala UPTD Kab.Sumba Tengah)	√								1						1				1	
Eselon IV (Kasubag TU UPTD Kab. Sumba Tengah)	√								1					1					1	
Eselon IV (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Sumba Tengah)	√								1					1						
Eselon IV (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Sumba Tengah)	√								1					1						
Fungsional Umum	√				1								1							
UPTD Kabupaten Sumba Barat																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Sumba Barat)	√								1						1				1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Sumba Barat)	√								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Sumba Barat)	√				1									1						
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Sumba Barat)	√								1					1					1	
Fungsional Umum	√			1	2								2	1						
UPTD Kabupaten Sumba Barat Daya																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Sumba Barat Daya)	√								1						1			1	1	
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Sumba Barat Daya)	√								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Sumba Barat Daya)	√								1					1					1	
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Sumba Barat Daya)	√								1					1					1	
Fungsional Umum	√				1				1	1			1	2						

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERKAHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				KET
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
UPTD Kabupaten Sabu Raijua																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Sabu Raijua)	V								1						1					1
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Sabu Raijua)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Penagihan UPTD Kab.Sabu Raijua)	V								1						1					1
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Sabu Raijua)	V								1						1					1
Fungsional Umum	V				2				1				2	1						
UPTD Kabupaten Malaka																				
Eselon III-B (Kepala UPTD Kab.Malaka)	V								1						1					1
Eselon IV-A (Kasubag TU UPTD Kab. Malaka)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Penetapan dan Pengihan UPTD Kab.Malaka)	V								1						1					
Eselon IV-A (Kasi. Verifikasi UPTD Kab. Malaka)	V								1						1					
Fungsional Umum	V								1						1					
Total	108	2		2	70		1	10	112	5			60	117	18			14	44	

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

DR. ZET SONY LIBING, M.Si

Pembina Tk. I

NIP.19680713 198903 1 009